

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan wilayah merupakan upaya pendorong perkembangan sosial, ekonomi agar tumbuh secara baik serta menjaga keberlangsungan kehidupan dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada di dalamnya. Fungsi dari pengembangan wilayah hakikatnya untuk kemakmuran wilayah dengan memberdayakan seluruh potensi yang ada secara optimal dengan mengupayakan keserasian dan keseimbangan pembangunan antar daerah serta pertumbuhan, pemerataan, dan keberlanjutan pembangunan (Baransano, 2016).

Namun, terjadinya keberhasilan pembangunan daerah, bukan berarti tidak adanya ketimpangan di daerah tersebut. Hal ini dikarenakan, ketimpangan merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan dari pembangunan atau dapat dikatakan bahwa ketimpangan sudah menjadi bagian dalam proses pembangunan tersebut. Sesuai dengan pendapat Douglas C. North bahwa pada tahap awal proses pembangunan, ketimpangan regional cenderung meningkat, tetapi setelah mencapai titik maksimum dan proses pembangunan dilanjutkan, maka ketimpangan pembangunan antar wilayah akan menurun dengan sendirinya. Hal ini terjadi, karena pada awal proses pembangunan, peluang ini dimanfaatkan oleh daerah yang sudah berkembang lebih baik. Daerah yang masih terbelakang, belum mampu memanfaatkan peluang pembangunan tersebut, sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah meningkat (Sjafrizal, 2012).

Adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah disebabkan oleh

beberapa hal diantaranya, perbedaan kandungan sumber daya alam, kondisi demografi, konsentrasi kegiatan ekonomi, kurang lancarnya mobilitas, dan alokasi dana pembangunan antar wilayah (Sjafrizal, 2012). Perbedaan tersebut mengakibatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan proses pembangunan juga berbeda. Oleh karena itu, di suatu daerah pasti terdapat daerah relatif maju dan daerah relatif terbelakang.

Ketimpangan pada dasarnya menimbulkan suatu masalah pembangunan dalam suatu wilayah yang akan berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang berujung kemiskinan dalam wilayah tersebut. Adanya wilayah yang memiliki faktor-faktor produksi yang lebih dan posisi yang sangat strategis akan mendukung wilayah tersebut berproduksi lebih banyak dibanding wilayah lain. Hal ini akan mendorong wilayah tersebut akan banyak menyerap investasi di daerah tersebut.

Pembangunan yang begitu cepat dan terpusat di kota akan berdampak pada terjadinya kecemburuan sosial antara satu wilayah dengan wilayah lain. Wilayah yang relatif maju didukung oleh adanya potensi yang ada dalam wilayah tersebut untuk bisa mengeksplorasi sumber daya yang ada. Dimisalkan bagi para investor yang ingin menanamkan modal di wilayah tersebut pastinya investor akan memberikan modal kepada wilayah yang memiliki potensi yang cukup besar untuk berkembang.



Sumber : Badan Pusat Statistik 2023 (Diolah)

**Gambar 1.1 Grafik Indeks Williamson Provinsi Aceh Tahun 2012-2021.**

Berdasarkan Gambar 1.1 disimpulkan bahwa ketimpangan pembangunan di Aceh mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012 menunjukkan angka indeks sebesar 0,45 persen, kemudian pada tahun 2013 angka indeks sebesar 0,43 persen dan pada tahun 2014 angka indeks ketimpangan Provinsi Aceh menurun sebesar 0,41. Angka indeks sebesar 0,38 persen pada tahun 2015, selanjutnya pada tahun 2016 angka indeks tetap 0,38 persen, dan pada tahun 2017 angka indeks tetap sebesar 0,38 persen, selanjutnya yang terjadi pada tahun 2018-2020 angka ketimpangan naik menjadi 0,47 persen, kemudian pada tahun 2021 angka indeks turun menjadi 0,41 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Aceh memiliki angka indeks ketimpangan yang menurun tetapi cenderung tetap dan tergolong dalam ketimpangan sedang.

Pembangunan di suatu wilayah dikatakan berhasil apabila dibarengi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Berbagai indikator untuk memantau

kemajuan di suatu daerah, yaitu indikator ekonomi maupun indikator sosial. Dalam konteks masyarakat sebagai obyek pembangunan, maka diperlukan indikator untuk mengukur perkembangan kehidupan atau tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Untuk melihat tingkat kesejahteraan dari segi ekonomi secara umum, indikator yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi. Maka, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting untuk menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi yang diukur dari perbedaan kenaikan dan penurunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun tertentu dengan tahun sebelumnya (Todaro, 2006).

Pembangunan ekonomi yang dilakukan secara terus menerus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka ketimpangan pembangunan suatu wilayah akan berkurang. Berdasarkan teori model pengembangan dari teori ekonomi modern yaitu model pertumbuhan endogen (*endogenous growth model*). Dalam model pertumbuhan endogen menekankan bahwa sumber daya manusia sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2006). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan di mana pada saat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah meningkat akan mengurangi ketimpangan di dalam wilayah tersebut, akan tetapi pertumbuhan ini harus diimbangi dengan pemerataan pendapatan perkapita bagi seluruh masyarakat (Todaro, 2006).

**Tabel 1.1**  
**Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pengeluaran**  
**Pemerintah Provinsi Aceh Tahun 2013-2022.**

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Pengeluaran Pemerintah (Miliar)
2013	2,61	10,30	11.217.741
2014	1,55	9,02	12.045.847
2015	-0,73	9,93	12.239.684
2016	3,31	7,57	12.119.713
2017	4,18	6,57	13.742.848
2018	4,61	6,36	12.306.306
2019	4,14	6,17	15.787.883
2020	-0,37	6,59	15.798.122
2021	2,79	6,3	13.948.388
2022	4,21	6,17	13.714.268

*Sumber data : Badan Pusat Statistik, 2024*

Peningkatan serta tingginya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh diharapkan terjadi secara merata dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi bila dilihat dari tabel 1.1 mengenai pertumbuhan ekonomi di Aceh menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi. Pertumbuhan ekonomi terendah pada tahun 2015 sebesar -0,73% kemudian meningkat pada tahun 2018 mencapai titik tertinggi hingga 4,61% selama 10 tahun terakhir. Melihat keadaan tersebut menandakan masih terjadinya ketimpangan di Aceh dapat dilihat pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi meningkat serta diikuti dengan meningkatnya tingkat ketimpangan yang tercermin dari angka indeks williamson pada gambar 1.2, bahwasanya antara tingkat pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pembangunan di Aceh menunjukkan ketidaksesuaian dengan teori

yang dikemukakan oleh Todaro.

Provinsi Aceh dengan status keistimewaan dan kekhususannya, memiliki sumber daya alam dan finansial untuk dapat mengelola pembangunan secara lebih baik, merata dan berkeadilan. Namun ketersediaan potensi yang cukup memadai tersebut belum mampu menciptakan keseimbangan pembangunan untuk daerah kabupaten dan kota di Aceh. Hal ini menunjukkan tingkat pertumbuhan yang tinggi disuatu wilayah tidak mencerminkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat wilayah tersebut juga meningkat. Selain itu, tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak dengan sendirinya diikuti oleh pertumbuhan atau perbaikan ketimpangan pembangunan wilayah tersebut.

Syafrizal (2012) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah salah satunya adalah karena perbedaan kondisi demografis. Demografis disini meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, dan perbedaan kondisi ketenagakerjaan termasuk di dalamnya adalah tingkat pengangguran. Daerah yang kondisi demografisnya baik akan mempunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga akan mendorong peningkatan investasi ke daerah yang bersangkutan. Melihat kondisi demografis dari sisi tingkat pengangguran suatu daerah. Secara teori dinyatakan bahwa tingkat pengangguran yang tinggi berhubungan dengan semakin tingginya ketimpangan wilayah (Lessman, 2006).

Tingkat pengangguran yang ada pada suatu wilayah dapat mempengaruhi ketimpangan wilayah. Semakin besar tingkat pengangguran disuatu daerah berarti

menurunkan tingkat produktivitas dan akan memicu menurunnya pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut, sementara wilayah lain terjadi peningkatan tingkat kesejahteraan. Pengangguran yang terjadi akan memiliki dampak terhadap kehidupan sosial yaitu tingkat kriminal dan kekerasan, hal ini akan berpengaruh pada stabilitas dan pembangunan ekonomi akan terhambat serta kesejahteraan akan berkurang (Nurcholis, 2014).

Berdasarkan data BPS pada tabel 1.1 perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Aceh terus mengalami fluktuasi. Tingkat pengangguran terbuka mencapai titik tertinggi pada tahun 2013 sebesar 10,30% angka ini ialah peningkatan tertinggi dalam 10 tahun terakhir, kemudian menurun hingga titik terendah pada tahun 2022 sebesar 6,17%. Melihat penurunan tingkat pengangguran terbuka dari tahun ke tahun akan tetapi ketimpangan pembangunan di Provinsi Aceh terus meningkat dan dapat dilihat pada tahun 2018 tingkat pengangguran terbuka menurun sebesar 6,36% sedangkan ketimpangan cenderung mengalami kenaikan sebesar 0,47%, hal ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan teori lessman. Oleh karena itu tingkat pengangguran terbuka yang rendah disuatu wilayah tidak mencerminkan ketimpangan pembangunan ikut menurun. Pengangguran yang terjadi akan memiliki dampak terhadap kehidupan sosial yaitu tingkat kriminal dan kekerasan, hal ini akan berpengaruh pada stabilitas dan pembangunan ekonomi akan terhambat serta kesejahteraan akan berkurang (Nurcholis, 2014).

Faktor lain yang dapat menyebabkan ketimpangan pembangunan adalah pengeluaran pemerintah. Pertumbuhan perekonomian tidak dapat terlepas dari peranan pemerintah disebuah negara, salah satunya melalui pengeluaran

pemerintah. Pengeluaran pemerintah merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penambahan permintaan agregat.

Todaro (2000) mengatakan bahwa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan wilayah, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk kepentingan publik, pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pembangunan tergantung dari pada rencana kegiatan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Apabila porsi dana pengeluaran lebih besar untuk belanja barang dan jasa daripada belanja pegawai maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan perbaikan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya akan menurunkan ketimpangan. Semakin besar pengeluaran pemerintah akan berdampak baik pada pembangunan daerah tersebut. Pengeluaran pemerintah dapat menjadi faktor pendorong perekonomian melalui program atau kegiatan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur untuk mendorong produktivitas sumber daya yang ada, sehingga akan mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan yang terjadi dalam suatu wilayah.

Data pengeluaran pemerintah wilayah Provinsi Aceh tahun 2013-2022 yang dapat dilihat pada tabel 1.1, berdasarkan data pada tabel 1.1 menunjukkan pengeluaran pemerintah di Wilayah Aceh berfluktuasi berawal dari tahun 2013–2022. Pengeluaran pemerintah tertinggi terjadi pada tahun 2019 yang mencapai 15.787.883 miliar rupiah angka ini ialah peningkatan tertinggi dalam 10 tahun terakhir, sedangkan pengeluaran pemerintah terendah terjadi pada tahun 2013 yang hanya mencapai 11.217.741 miliar rupiah. Pada tahun 2017 pengeluaran

pemerintah meningkat sebesar 13.742.848 miliar rupiah akan tetapi ketimpangan pembangunan di Provinsi Aceh pada tahun 2017 tetap sebesar 0.38%. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan teori yang dikemukakan oleh Todaro (2000).

Sesuai dengan tujuan dari pembangunan ekonomi daerah serta keterkaitannya dengan ketimpangan pembangunan wilayah, maka pemerintah daerah berkewajiban menyelesaikan ketimpangan wilayah tersebut. Masalah ketimpangan pembangunan wilayah tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah daerah itu sendiri, akan tetapi harus ada koordinasi antar sesama pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan ketimpangan wilayah yang terjadi.

Dari beberapa jurnal yang dijadikan referensi, hanya sebagian jurnal yang meneliti tentang pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pembangunan wilayah. Maka dari itu penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan Kurniati Mansyur (2021) di Provinsi Sulawesi Selatan dengan variabel independen yang sama yaitu pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah. Keterbaruan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yakni berada pada penambahan variabel tingkat pengangguran terbuka dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model *Auto Regressive Distributed Lag* (ARDL). Kelebihan model ARDL adalah dapat membedakan respon jangka pendek dan jangka panjang dari variabel terikat terhadap suatu unit perubahan dalam nilai variabel penjelas (X). Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka dan pengeluaran pemerintah yang berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Aceh. Sehingga judul

yang diteliti dalam penelitian ini adalah **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Aceh”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Aceh dalam jangka pendek dan jangka panjang?
2. Bagaimana pengangguran terbuka berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Aceh dalam jangka pendek dan jangka panjang?
3. Bagaimana pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Aceh dalam jangka pendek dan jangka panjang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Aceh dalam jangka pendek dan jangka panjang.

2. Untuk mengetahui pengaruh pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Aceh dalam jangka pendek dan jangka panjang.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Aceh dalam jangka pendek dan jangka panjang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain yang membutuhkan. Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

##### **1.4.1 Manfaat teoritis**

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis, diantaranya:

1. Sebagai acuan atau tambahan informasi bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian lebih lanjut.
2. Menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu ekonomi dan studi pembangunan untuk mengetahui bagaimana strategi yang diterapkan dalam perekonomian serta bagaimana penerapannya.

##### **1.4.2 Manfaat praktis**

Penelitian ini juga memiliki beberapa manfaat praktis, diantaranya:

1. Sebagai referensi untuk penelitian berikutnya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut.

2. Untuk pemerintah di daerah Aceh, diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam merumuskan kebijakan mengenai ketimpangan pembangunan, terutama yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, dan pengeluaran pemerintah, baik untuk pemerintah Provinsi maupun pemerintah-pemerintah kabupaten/kota lainnya.